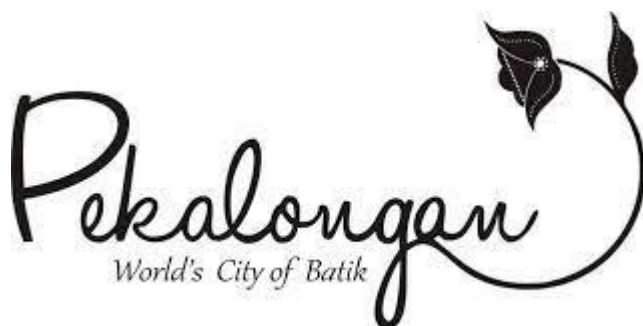




**PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN**

**RENJA
PERANGKAT
DAERAH
TAHUN 2024**



**KECAMATAN
PEKALONGAN UTARA**

**Jl. Kusuma Bangsa No.96 Telp. (0285)
423709 Pekalongan**

KATA PENGANTAR

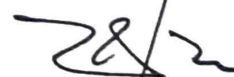
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan ridho-Nya Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2024 dapat disusun dengan baik dan lancar. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2024 merupakan rencana kerja yang akan dilakukan oleh Kecamatan Pekalongan Utara selama 1 (satu) Tahun ke depan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Pekalongan Utara merupakan keharusan dalam rangka menetapkan Program dan Kegiatan 1(satu) tahunan sesuai dengan Visi Misi Kepala Daerah yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra).

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini adalah untuk mensinkronisasikan antara pelayanan publik, kewilayahan dan non urusan dengan Program Kegiatan sesuai dengan Kebijakan Umum APBD & Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Kota Pekalongan Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja ini juga bertujuan sebagai upaya memberikan arah / pedoman untuk rencana kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara selama tahun 2024. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak baik terhadap peningkatan pelayanan masyarakat dan menjaga ketentraman masyarakat.

Besar harapan kami, Rencana Kerja (RENJA) ini dapat digunakan sebagai Bahan Pertimbangan untuk memberikan Kebijakan guna mengurangi Kesenjangan Pelayanan Masyarakat dan juga berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Kecamatan Pekalongan Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat . Kami sadar bahwa dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini masih banyak terdapat kekurangan sehingga kami sangat memerlukan saran, kritik maupun masukan dari semua pihak sebagai bahan untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara pada Tahun-tahun berikutnya.

Pekalongan, 9 Agustus 2023

Camat Pekalongan Utara
Kota Pekalongan



WISMO ADITIYO, S.Pt., M.T
19710926 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	5
I.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	9
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
II.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	31
III.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	31
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	33
III.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	46
BAB V PENUTUP	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Pasal 27), menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran untuk Tahun 2024. Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 ini disusun berdasarkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU-SPPN) yang telah dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja dilakukan dengan melaksanakan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi riil pada Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dengan mempertimbangkan keintegrasian, keselarasan, dan sinergitas dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pekalongan Utara tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Hal ini dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu, saling mendukung samapai dengan seluruh tujuan dan sasaran yang terkait dengan urusan perencanaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui tiga tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup sebagai berikut :

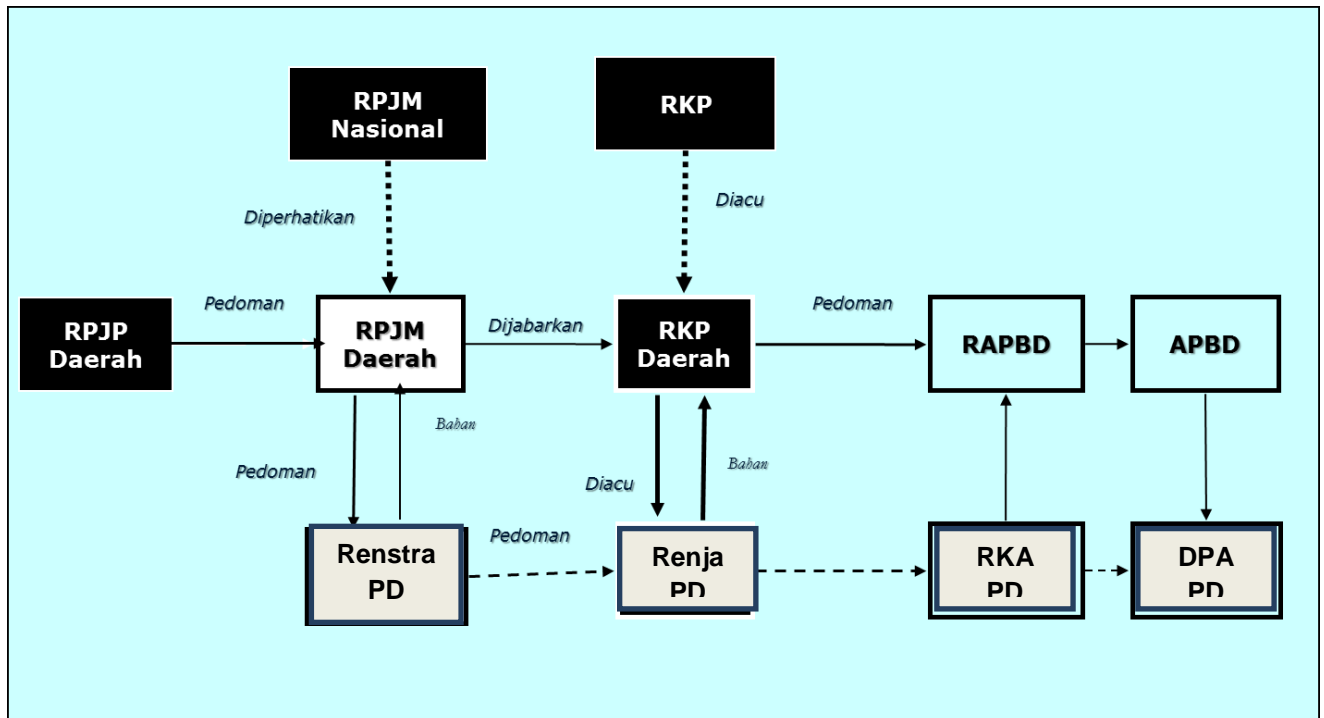
1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.
3. Tahap penetapan Renja OPD.

Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan penentuan pagu dalam Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada rencana program prioritas pada Rancangan Akhir RKPD Kota Pekalongan Tahun 2024. Untuk penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rancangan Akhir RKPD yang disusun ke dalam Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selaras dengan Renstra Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan Penetapan Renja Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Akhir Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun yang

sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekalongan serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Gambar 1
Hubungan Renja dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (diolah)

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2024 didasarkan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 8. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
 10. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
 11. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2021-2026;
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas wilayah yaitu perencanaan strategis di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan guna mewujudkan keadaan dalam waktu satu tahun kedepan yang mendukung visi misi Kepala Daerah, yang diutamakan guna kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tahun 2024 dimaksudkan untuk dan menyelaraskan prioritas program dan kegiatan Kecamatan Pekalongan Utara dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, penyusunan Rencana Kerja ini juga dimaksudkan untuk melakukan upaya sinkronisasi terhadap program-program dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2024. Hal ini untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan langkah-langkah kebijakan pemerintah daerah Kota Pekalongan pada Tahun 2024.

Kemudian tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai pedoman bagi Kecamatan Pekalongan Utara dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 serta keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi, misi dan program pembangunan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota masa bakti 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara adalah :

1. Sebagai acuan/arah bagi Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2024 berdasarkan ketersediaan sumberdaya yang ada;
2. Memberikan landasan operasional bagi seluruh Kasi/Kasubag di lingkungan Kecamatan Pekalongan Utara dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024.
3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

I.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pada bab ini dibagi menjadi lima bagian pembahasan, yaitu :

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah,

Bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah,

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan;

II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,

berisikan uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Tantangan dan peluang, serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

II.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

berisikan tentang proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

diuraikan kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta

kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN,

pada bab ini pembahasan dibagi menjadi **beberapa** pembagian pembahasan, yaitu :

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional,

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah,

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;

III.3 Program dan Kegiatan, dan Sub Kegiatan

faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program, kegiatan, dan sub kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Capaian Renstra PD sampai dengan Tahun 2023. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan PD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan PD.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

Hasil evaluasi pelaksanaan renja Tahun lalu (tahun 2022) dan Tahun Berjalan 2023, Kecamatan Pekalongan Utara dapat disajikan dalam tabel T-II.1 sebagai berikut :

TABEL T-II.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
S/D. TAHUN BERJALAN
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA
TAHUN : 2023

No	Indikator Program / Kegiatan		Satuan	Target Akhir Renstra	Kondisi Awal (Perub RPJMD 2016-2021)	Realisasi 2021	Tahun 2022		Realisasi Capaian RPJMD s.d Tahun 2022	Persentase Capaian Target RPJMD	Status Capaian
							Target 2022	Realisasi 2022			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.0.00.0.00 .01.0000	Kecamatan Pekalongan Utara										
7	Urusan Kewilayahan										
7.01	Kecamatan										
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	URUSAN DAERAH									
		- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Persentase	100%	100%	100%	100 % 100% 100%	100% 100% 93,3%	100% 100% 93,3%	100% 100% 93,3%	Tercapai Tercapai ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapai

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100%	100%	100 %	100 %	93,3%	93,3%	93,3%	ada kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Kegiatan baru
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan / Kelurahan di Wilayah Utara	Persentase	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	Kegiatan di Th 2023
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Persentase	100%	0%	100 %	100 %	100%	100%	100%	Tercapi
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Persentase	100%	0%	0 %	0%	0%	0%	0%	Kegiatan di Th 2023
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0001	Kelurahan Kandang Panjang											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Panjang Wetan											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0003	Kelurahan Degayu											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Bandengan											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	99,60%	99,60%	99,60%	99,60%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan	Persentase ketercapaian	Persentase	100%	100%	100%	100%	99,60%	99,60%	99,60%	99,60%	Tercapai

	Kelurahan	pemberdayaan kelurahan										
7.01.0.00.0.00 .01.0005	Kelurahan Krapyak											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00 .01.0006	Kelurahan Padukuhan Kraton											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7.01.0.00.0.00 .01.0007	Kelurahan Panjang Baru											
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase ketercapaian pemberdayaan masyarakat kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, berisikan Capaian Kinerja pelayanan sesuai dengan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK. Indikator Kinerja yang akan dimuat berdasarkan tugas dan fungsi instansi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kajian pelayanan.

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KECAMATAN PEKALONGAN UTARA (YANG DIAMPU OLEH CAMAT)

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3. Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100% 100% 100%	100% 100% 93,3%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	100%	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Utara	100%	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	100%	100%

5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara	100%	100%
---	--	--	------	------

Hasil analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah disajikan dalam tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pekalongan Utara, sebagaimana terlampir.

**TABEL T-II.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI			CATATAN ANALISIS
				Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	Tahun 2022 (Thn. n-2)	Tahun 2023 (Thn. n-1)	Tahun 2024 (Thn. n)	Tahun 2025 (Thn. N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Nilai SAKIP OPD			75,5	77	78,5	80	75	-	78,5	80	
2.	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	

3.	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	31,5%	100%	100%	
4.	Persentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah			100%	100%	100%	100%	93,3%	30%	100%	100%	
5.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
6.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
7.	Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	
8.	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	50,7%	100%	100%	
9.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara			100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah, dimana permasalahan urusan merupakan penjabarkan dari akar masalah di tingkat kota. Indentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kecamatan Pekalongan Utara sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan tersaji dalam 2 urusan yang diampu yaitu sebagai berikut :

a. Urusan Kewilayahan

Permasalahan yang ada yaitu :

1. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Trantibum
3. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan/Kelurahan
4. Belum optimalnya Tingkat Kinerja Pemerintahan Umum
5. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
6. Belum optimalnya kualitas pengawasan Perangkat Daerah

b. Non Urusan

Permasalahan yang ada yaitu :

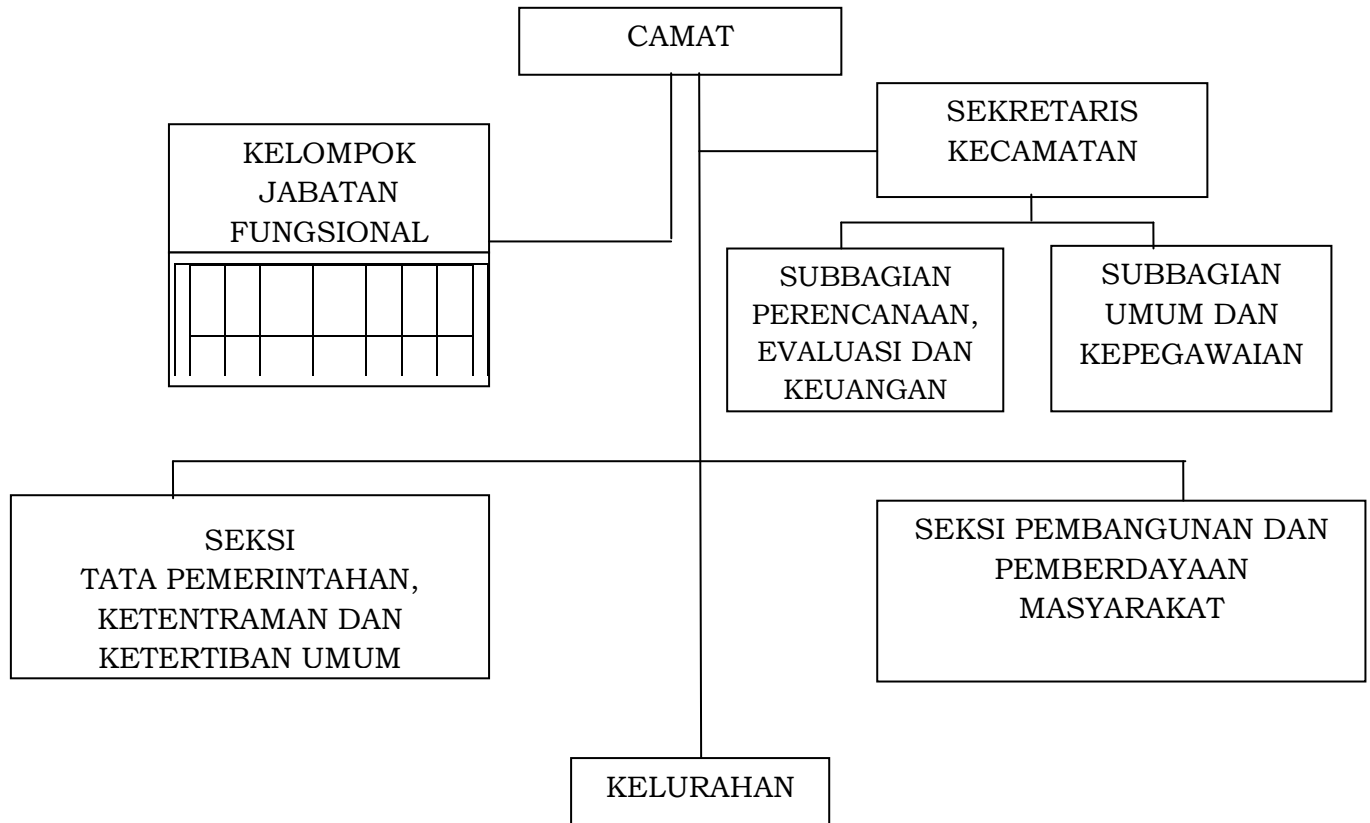
1. Belum optimalnya ketersediaan laporan capaian kinerja
2. Belum optimalnya ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
3. Belum optimalnya pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah
4. Belum optimalnya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
5. Belum optimalnya ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah
6. Belum optimalnya ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Belum optimalnya ketercapaian administrasi umum perangkat daerah
8. Belum optimalnya SDM di kecamatan pekalongan utara

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW di Kota Pekalongan yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara, sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang ramah, cepat, tepat, efisien, dan transparan.
- b. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kota Pekalongan dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Pekalongan Utara dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan dan perbaikan terhadap kondisi geografis yang sampai dengan ini terjadi untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**



II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awaal RKPD menjadi acuan dalam penyusunan rancangan kerja OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Dokumen rencana kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaian merupakan representatif tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Pekalongan Utara. Disamping itu dokumen Rancangan awal RKPD juga memuat informasi tentang program, kegiatan serta sub kegiatan.

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tengah Tahun 2024 bahwa Kecamatan Pekalongan Utara bertanggungjawab atas penyelenggaraan salah sasaran stragis daerah terkait Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, di Kota Pekalongan. Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 sudah semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang pada Kecamatan Pekalongan Utara sudah diakomodir. Untuk kondisi Anggaran Tahun 2024 belum sesuai dengan kebutuhan yang ada dan ke depannya semoga tidak terjadi refocusing. Review Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini

TABEL T-II.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
KOTA PEKALONGAN

OPD KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pekalonga Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen 2 Dokumen	Rp 2.668.000 Rp 1.886.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalonga Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen 2 Dokumen 11 Laporan	Rp 2.668.000 Rp 1.886.000 Rp 117.000.000	

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Laporan	Rp 117.000.000					
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pekalongan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	Rp 7.943.230.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/Bulan	Rp 7.943.230.000
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Rp 234.300.000	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pekalongan Utara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	96 Dokumen	Rp 234.300.000
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.748.000	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	Rp 1.748.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian	Kecamatan Pekalongan	Jumlah Paket	1 Paket	Rp 10.000.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n Utara	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	Rp 10.000.000	Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n Utara	Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah				
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 6.450.000	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 6.450.000
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	117 Paket	Rp 128.248.000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pekalongan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	117 Paket	Rp 128.248.000
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Utara	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	96 Paket	Rp 7.875.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	96 Paket	Rp 7.875.000
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	88 Paket	Rp 201.062.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	88 Paket	Rp 201.062.000
- Penyediaan Barang Cetak dan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	96 Paket	Rp 40.000.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	96 Dokumen	Rp 40.000.000
					- Penyelenggaraan				Rp 12.000.000

Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	96 Dokumen	Rp 12.000.000	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pekalongan Utara	Disediakan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 19.000.000	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp 19.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	96 Laporan 12 Laporan 96 Laporan	Rp 10.500.000 Rp 125.884.000 Rp 10.500.000
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	96 Laporan	Rp 10.500.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 125.884.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	96 Laporan	Rp 10.500.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					

			Disediakan							
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan – Pemeliharaan/Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	Rp 133.161.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan – Pemeliharaan/Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya – Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31 Unit	Rp 133.161.000	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	1 Unit	Rp 850.800.000			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	1 Unit	Rp 850.800.000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	120 Unit	Rp 45.000.000			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab	120 Unit	Rp 45.000.000	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan	Rp 12.500.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan 4 Laporan	Rp 12.500.000 Rp 7.125.000

	Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	Rp 7.125.000					
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasy	Rp 48.261.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasy	Rp 48.261.000
			Jumlah Keluarga	2400 keluarga	Rp 67.050.000			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan	2400 keluarga	Rp 67.050.000

	Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75 Laporan	Rp 352.808.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pekalongan Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	75 Laporan	Rp 352.808.000	

	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan									
5	PROGRAM PENYELENG GARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pekalonga n Utara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp 5.625.000	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pekalonga n Utara	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	Rp 5.625.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pekalongan Utara dalam penyusunan program dan kegiatan terlebih dahulu menampung aspirasi masyarakat dari pemangku kepentingan, baik dari OPD terkait, kelompok masyarakat maupun warga masyarakat.

Berdasarkan hasil rumusan dari pemangku kepentingan tersebut dilakukan penyesuaian dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah sekaligus merupakan program dan kegiatan yang merupakan isu-isu strategis Perangkat Daerah, tentu saja usulan program dan kegiatan ini adalah berdasarkan pada skala prioritas.

TABEL T-VI.C.9
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN / VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

TUJUAN, SASARAN, PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan nasional merupakan acuan utama bagi setiap daerah propinsi dan Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota harus didasari oleh visi dan misi daerah dan output akhirnya berupa pola dasar pembangunan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.
2. Masih tingginya angka stunting dan anak tidak sekolah dapat berpengaruh pada tingkat IPM Masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama lintas sektor agar lebih optimal serta dukungan anggaran yang memadai.
3. Belum optimalnya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. Permasalahan ini muncul sebagai akibat faktor eksternal berupa cepatnya.
4. Perubahan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan penataan organisasi dan kelembagaan serta ketatalaksanaan pemerintahan. Dampak dari perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah membutuhkan proses penyatuan dengan situasi dan kondisi yang akhirnya menghambat laju kinerja aparatur.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia dengan kompetensi yang layak dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat Kecamatan Pekalongan Utara.
6. Belum optimalnya hubungan koordinasi dengan LPM dan BKM dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.
7. Pagu anggaran yang dirasa kurang maksimal dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan sarana prasarana dasar yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang menurun.

8. Kinerja aparatur Kelurahan perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, hal tersebut terjadi sebagai akibat :
 - a. Kurang representatifnya lokasi kantor Kelurahan dikarenakan tuntutan perubahan zaman (kondisi rusak, kurang luas dll)
 - b. Belum tersedianya rumah dinas Kelurahan yang bisa difungsikan bagi aparat Kelurahan yang berdomisili diluar wilayah kerja Kelurahan setempat.
 - c. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang masing belum maksimal
9. Pagu anggaran untuk fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olah raga maupun fasilitasi kegiatan ormas yang belum teralokasikan, sehingga terkendala dalam penyelenggaraan kegiatan yang bersifat dukungan terhadap kreatifitas pemuda di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara.

Keberhasilan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi didasari oleh beberapa faktor yakni sebagai berikut :

- a. Adanya pimpinan sebagai role model di sebuah SKPD
- b. Adanya dukungan pimpinan
- c. Adanya sarana dan prasarana yang memadai
- d. Adanya program dan kegiatan yang jelas
- e. Tersedianya tupoksi yang jelas dan tanggungjawab dalam pekerjaan
- f. Tersedianya aparatur pemerintahan yang memadai baik ASN maupun non ASN

Rumusan Visi misi Kota Pekalongan yang diangkat dalam Renstra Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Kota Pekalongan dalam lima tahun ke depan, yaitu : yaitu **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Pekalongan ini, Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Pekalongan Utara adalah sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik
2. Sasaran
 - a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
 - b. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum

Tujuan dan sasaran seperti yang diuraikan diatas disusun juga dengan kaitan untuk mendukung pencapaian prioritas RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Pekalongan Utara. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan- tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Untuk optimalisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Pekalongan Utara melaksanakan Visi dan Misi yang telah disusun oleh Kepala Daerah terpilih. Kemudian sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan pemerintahan di tingkat wilayah Kecamatan maka ditetapkan bahwa Kecamatan menjalankan Misi dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan

“Meningkatkan Kualitas Layanan Publik”

Sasaran

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan Trantibum.

III.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan guna terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah serta dengan melihat prioritas pembangunan yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat daerah menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja tahun 2024 merupakan lanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2024. Pada prinsipnya program dan kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas sesuai pagu indikatif yang ditetapkan.

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2024 adalah sebanyak 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 14.814.488.000,-.

Sehubungan dengan hal tersebut untuk Rencana Kerja Tahun 2024 dengan melihat renstra 2021-2026 sesuai analisis dari Bappeda, Kecamatan Pekalongan Utara melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (Dua Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif awal sebesar Rp 14.814.488.000,-. dengan rincian sebagai berikut :

1.1. PROGRAM

1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.1.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1.2. KEGIATAN

1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1.2.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1.2.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.2.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1.2.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1.2.2.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- 1.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.2.3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - 1.2.3.1 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
- 1.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.2.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1.2.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1.2.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- 1.3. SUB KEGIATAN
 - 1.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.3.1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.3.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.3.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - 1.3.1.1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.3.1.2. Administrasi Keuangan Daerah
 - 1.3.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3.1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD
 - 1.3.1.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.3.1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

1.3.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.1.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.1.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.1.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.1.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.3.1.4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

1.3.1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.3.1.5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.3.1.5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.3.1.6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.3.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

1.3.1.6.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

1.3.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.3.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1.3.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1.3.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
 - 1.3.2.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1.3.2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
- 1.3.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1.3.3.1 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
 - 1.3.3.1.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.3.3.2 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1.3.3.2.1 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- 1.3.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.3.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1.3.4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- 1.3.5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1.3.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1.3.5.1.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/SubKegiatan	INDIKATOR KINERJA BESARAN / VOLUME CATATAN				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Pekalongan Utara								
7	Urusan Kewilayahan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja -Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	Kecamatan Pekalongan Utara	100%				100%	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Kecamatan Pekalongan Utara		Rp 2.668.000 Rp 1.886.000	 APBD			Rp 2.668.000 Rp 1.886.000

	Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Rp 117.000.000	APBD			Rp 117.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				APBD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara						
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Rp 7.943.230.000	APBD			Rp 7.943.230.000
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Rp 234.300.000	APBD			Rp 234.300.000
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rp 1.748.000	APBD			Rp 1.748.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara						

	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			Rp 10.000.000	APBD			Rp 10.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Rp 6.450.000	APBD			Rp 6.450.000
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Rp 128.248.000	APBD			Rp 128.248.000
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Rp 7.875.000	APBD			Rp 7.875.000
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Rp 201.062.000	APBD			Rp 201.062.000
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Rp 40.000.000	APBD			Rp 40.000.000
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan			Rp 12.000.000	APBD			Rp 12.000.000
		Jumlah Laporan				APBD			

	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp 19.000.000				Rp 19.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp 10.500.000	APBD			Rp 10.500.000
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Rp 125.884.000	APBD			Rp 125.884.000
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Rp 10.500.000	APBD			Rp 10.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pekalongan Utara						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			Rp 133.161.000	APBD			Rp 133.161.000

	atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan/Rehab Gedung kantor dan bangunan lainnya - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab			Rp 850.800.000 Rp 45.000.000	APBD APBD			Rp 850.800.000 Rp 45.000.000
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik di Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	100%				100%	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Pekalongan Utara			APBD APBD			Rp 12.500.000 Rp 12.500.000

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan yang kepada Camat	Kecamatan Pekalongan Utara			APBD		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Lain yang Dilimpahkan	Laporan Kewenangan yang Dilimpahkan			Rp 7.125.000	APBD		Rp 7.125.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat / Kelurahan di Utara	Kinerja Kecamatan / Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	100%			100%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase ketercapaian pemberdayaan kelurahan Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun Jumlah Dokumen FDKP yang disusun	Kecamatan Pekalongan Utara			APBD		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan		Kecamatan Pekalongan Utara					
	Penyelenggaraan Lembaga	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang				Rp 48.261.000	APBD		Rp 48.261.000

	Kemasyarakatan	Diselenggarakan							
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pekalongan Utara		Rp 67.050.000	APBD			Rp 67.050.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Kinerja Trantibum Wilayah Utara	Kecamatan Pekalongan Utara	100%				100%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi	Kecamatan Pekalongan Utara		Rp 352.808.000	APBD			Rp 352.808.000

	Wilayah Kecamatan	Vertikal di Wilayah Kecamatan							
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di Wilayah Utara		100%				100%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 5.625.000	APBD			Rp 5.625.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis Good Governace dan Clean Goverment dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) mengikuti paradigma baru yang akan mampu menciptakan kebijakan (trickle down effect) sehingga kepentingan masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan selain menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 juga berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Renja diharapkan juga mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan kebijakan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pemangku jabatan dan staf Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih optimal.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal yang perlu diperhatikan selama tahun berjalan guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 ini kami sajikan sebagai bentuk acuan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang, sehingga tercapai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan yang lebih baik dengan prinsip bersama-sama melaksanakan pembangunan dengan asas transparansi, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan bersama di wilayah Kecamatan Pekalongan Utara serta sebagai bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Pekalongan.

Rencana Kerja Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2024,

Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan Guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait tata kelola pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Ada 5 Program, 11 kegiatan dan 25 Sub Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp 14.814.488.000,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kewilayahan dan Non-Urusan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2024 merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Rencana Kerja yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting sebagai pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Kecamatan Pekalongan Utara dalam mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan. Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Rencana Kerja yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pekalongan Utara;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja tahap berikutnya.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Renja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Visi, Misi, dan Tupoksi Kecamatan Pekalongan Utara. Semoga Renja Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah Kota Pekalongan tahun 2024.

Demikian kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Pekalongan, 9 Agustus 2023
CAMAT PEKALONGAN UTARA
KOTA PEKALONGAN



WISMA ADITYO, S.Pt., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19710926 199903 1 006

